

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari lima pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Papua, selain itu juga masih banyak pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Marauke. Pulau-pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi serta memiliki keanekaragaman bahasa, budaya, agama, suku, dan adat istiadat. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki tersebut sangat mendukung berkembangnya industri pariwisata. Karakteristik sumber daya alam dan masyarakatnya sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai potensi wisata, yang akan mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Potensi pariwisata yang dimiliki haruslah dikelola oleh orang-orang yang ahli dalam kepariwisataan, dengan adanya para ahli tersebut dapat menggali potensi obyek wisata dengan baik yang akan meningkatkan keuntungan pendapatan besar.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia dengan daya tarik wisata budaya dan alam yang beraneka ragam. Beberapa daya tarik budaya yang banyak dikenal di Jawa Tengah adalah peninggalan situs-situs purbakala seperti Candi Borobudur, Prambanan dan lain-lain. Tidak hanya wisata yang berbau peninggalan budaya, di wilayah Jawa Tengah ada berbagai macam tempat wisata mulai dari pantai, air terjun, gua, pegunungan serta masih banyak yang lainnya. Adanya potensi yang dimiliki maka pemerintah melakukan pengembangan pariwisata yang tersebar di 35

kabupaten/kota dengan tujuan mempromosikan pariwisata dan meningkatkan kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial budaya. Salah satu daerah yang melakukan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah adalah Kota Salatiga.

Kota Salatiga dikenal sebagai kota transit di Provinsi Jawa Tengah bagi para wisatawan, yang dikelilingi oleh jalur kota-kota daerah tujuan wisata seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali. Kota salatiga memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata di Indonesia. Pembangunan objek wisata di Kota Salatiga dapat diciptakan dengan melakukan atraksi-atraksi yang bersifat menghibur. Selain itu juga mempunyai daya tarik dan keunikan yang tidak dijumpai di daerah lain, antara lain pada Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Sidomukti dengan latar belakang pemandangan yang indah berupa Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Payung Rong. Pengembangan pariwisata di Kota Salatiga mulai serius digarap dengan cara memaksimalakan semua potensi yang ada selain itu juga dilakukan memperbanyak *event-event* hiburan mulai dari skala kecil hingga nasional. Salah satunya yaitu dengan memperkenalkan drumblek sebagai hasil kreativitas asli Kota Salatiga. Di daerah Kecamatan Tingkir Lor juga ada pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan adanya sebuah desa wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan.

Tabel 1.1**Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kota Salatiga**

Tahun	Pengunjung Wisata		Jumlah Pengunjung	Persentase
	Domestik	M mancanegara		
2013	335.841	400	336.241	0%
2014	366.947	409	367.356	8%
2015	403.865	463	404.328	9%
2016	465.138	502	465.640	13%
2017	467.279	536	467.815	0,3%

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Salatiga dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisata tahun 2014 sebanyak 367.356 wisatawan yang terdiri dari 366.947 wisatawan domestik dan 409 wisatawan mancanegara, meningkat sebanyak 31.115 wisatawan dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2015 meningkat sebanyak 36.972 dengan jumlah pengunjung 404.328 yang terdiri dari 403.865 wisatawan domestik dan 463 wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 465.640 wisatawan, meningkat dari tahun 2015 sebanyak 404.328 wisatawan. Pada tahun 2017 peningkatan yang terjadi sebanyak 2.175 wisatawan jumlah kunjungan wisatawan tersebut terdiri dari 467.279 wisatawan domestik dan 536 wisatawan asing.

Pengembangan destinasi wisata di Kota Salatiga dilakukan dengan cara pengakatan potensi lokal dengan berupa adanya desa wisata. Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya

tarik yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pembangunan fasilitas pendukung wisatanya untuk dijadikan sebagai objek wisata. Desa Tingkir Lor Kota Salatiga mulai berkembang menjadi desa wisata pada tahun 2002 dan telah diresmikan pada tahun 2015. Awal dari pembuatan keputusan untuk menjadikan sebuah desa wisata karena dari banyaknya kunjungan pembeli hasil kerajinan konveksi terbesar yang ada di desa ini. Usaha konveksi di Desa Wisata Tingkir Lor ini sudah turun-temurun dari puluhan tahun yang lalu. Selain itu, Kota Salatiga sendiri juga memiliki potensi alam dan budaya yang akan meningkatkan produktivitas pariwisata dengan adanya pengembangan desa wisata ini.

Desa wisata Tingkir Lor memiliki daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Desa wisata Tingkir Lor menawarkan konsep wisata alternatif, yaitu wisata belanja hasil produk unggulan konveksi (sprai, sarung bantal, celana kolor), wisata pendidikan (*outbound*, aktifitas diluar ruangan) dan seni budaya. Daya tarik Desa tingkir Lor lainnya yaitu kesenian drumblek. Drumblek ini memiliki kemiripan dengan *marching band*, perbedaanya hanya pada alat musik yang digunakan. Drumblek lebih banyak menggunakan alat-alat musik yang berasal dari barang bekas kemudian didaur ulang, seperti kaleng, bambu, drum, dan lain sebagainya. Selain itu Desa Tingkir Lor juga memiliki daya tarik di kuliner khasnya dan hasil konveksi yang dibuat oleh para masyarakatnya.

Desa wisata Tingkir Lor dalam 2 (Dua) Tahun terakhir yaitu Tahun 2016 dan Tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah wisatawan (pengunjung) yang cukup signifikan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Tingkir Lor sebanyak 2.570 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 6 orang, sedangkan pada tahun 2017 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Tingkir Lor sebanyak 2.885 orang atau meningkat 12,25 % dan wisatawan mancanegara sebanyak 103 orang atau meningkat 58,25 %.

Proses pengelolaan desa wisata setidaknya ada tiga aktor yang berperan penting yaitu pemerintah, penduduk setempat dan bisnis pariwisata atau perantara (swasta). Ketiga aktor tersebut harus melebur secara utuh untuk mewujudkan industri pariwisata yang dapat menguntungkan semua pihak. Wisatawan merupakan aktor penentu, karena aktivitas desa wisata muncul karena adanya perubahan selera wisatawan dalam memandang daerah tujuan wisata. Sedangkan penduduk setempat adalah mereka yang terkena dampak dari kunjungan wisatawan, yang mempersiapkan apa yang dibutuhkan wisatawan, dan yang akan menerima rejeki dari wisatawan. Bisnis pariwisata adalah mereka yang mempromosikan daerah tujuan wisata kepada wisatawan sehingga merupakan aktor yang mencari keuntungan dari wisatawan dan memberikan keuntungan bagi penduduk setempat (Prabaningrum 2010:5).

Desa wisata Tingkir Lor merupakan salah satu destinasi pariwisata yang berpotensi menjadi desa unggulan yang ada di Kota Salatiga. Potensi yang ada seharusnya dapat dilakukan dengan maksimal karena dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat sekitar desa wisata dan mampu mengembangkan desa wisata Tingkir Lor. Desa wisata Tingkir Lor yang berpotensi menjadi desa wisata unggulan, namun minimnya sumberdaya manusia serta proses pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah yang terlibat masih rendah sehingga menjadi persoalan dalam proses pengelolaan itu sendiri.

Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor diawali dengan adanya perencanaan sejak tahun 1960-an, telah berdiri sebuah pabrik tekstil di desa Tingkir Lor yang bernama PT Daya Manunggal Tekstil atau PT Damatex. Sebagai pabrik tekstil terbesar di Kota Salatiga, PT Damatex juga menghasilkan limbah kain yang cukup banyak. Limbah tersebut kemudian dibuang dan diperkenankan dimanfaatkan oleh warga sekitar apabila berkenan. Warga di sekitar pun banyak memanfaatkan limbah kain tersebut menjadi barang-barang konveksi. Hal itu yang menjadi awal mula dari berdirinya usaha koneksi di desa Tingkir Lor. Usaha koneksi warga di desa tersebut menjadi semakin berkembang. Banyak di antara warga Tingkir Lor yang akhirnya juga membuat usaha konveksi. Akibat menjadi usaha utama, mereka tidak lagi mengandalkan kain sisa dari pabrik tekstil yang ada di sana. Pemerintah Kota Salatiga kemudian menetapkan Tingkir Lor menjadi sentra usaha konveksi di Kota Salatiga yang juga berubah menjadi Desa Wisata Tingkir Lor. Proses perencanaan ini juga tidak terlepas dari peran akademisi yang ada di Kota Salatiga, hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan *workshop* tentang pengembangan Desa Wisata Tingkir Lor di Kampoeng Percik Salatiga yang disampaikan oleh dosen UKSW Yussiady Bambang Singgih.

Proses pengorganisasian yang dilakukan oleh masyarakat ada dua bentuk kepengurusan di Desa Wisata Tingkir Lor, yaitu organisasi Pokdarwis dan organisasi Pengelola Desa Wisata. Tahap pengeorganisasian ini peran yang menonjol adalah pemerintah, pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Salatiga. Peran pemerintah tersebut sebagai fasilitator dan regulator. Peran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Salatiga yaitu dengan membentuk kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis) sedangkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Salatiga membentuk organisasi pengelola desa wisata. Kepengurusan organisasi pengelola desa wisata saat ini yang strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang keamanan & transportasi, bidang makanan dan minuman, bidang kerajinan, bidang kesenian, bidang *homestay*, bidang *outbond*, dan bidang promosi.

Pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor terlihat dengan banyaknya warga Tingkir Lor yang beramai-ramai mengelola usaha konveksi di rumahnya. Selain usaha konveksi yang memiliki fungsi ekonomi, terdapat juga hal-hal lain yang menjadi daya tarik utama bagi desa ini. Warga desa memanfaatkan sumber daya alam yang ada yang kemudian digabungkan dengan kreativitas masyarakat setempat. Beberapa bentuk wisata buatan yang ada adalah shelter cengkek yang merupakan kursi beratap yang digunakan untuk tempat duduk dan kolam ikan yang dibangun dengan memanfaatkan aliran Sungai Cengkek yang deras. Selain itu juga ada tiga hal yang tercakup dalam wisata pendidikan, yaitu aktivitas fisik di luar ruangan (*outbond*), wisata membuat

olahan produk khas Tingkir Lor seperti konveksi dan makanan, serta wisata sejarah.

Proses pengelolaan desa wisata ini yang paling berperan adalah masyarakat, pelaku usaha atau bisnis dan media massa. Peran masyarakat dalam pengelolaan desa wisata ini dengan berpartisipasi aktif demi kemajuan pengembangan desa wisata Tingkir Lor. Masyarakat melakukan kegiatan pengelolaan obyek wisata yang ada di Desa Wisata Tingkir Lor selain itu mereka juga mempunyai kegiatan pengembangan produk-produk wisata seperti pendirian usaha rumahan maupun industri. Pengelolaan desa wisata Tingkir Lor ini juga tidak terlepas dari kerjasama dengan pelaku usaha atau bisnis lainnya seperti Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia Salatiga dan pelaku usaha perjalanan wisata. Peran bisnis ini sebagai investor dan pendamping dalam pengelolaan desa wisata. Peran pelaku bisnis ini sangat penting bagi pengembangan desa wisata Tingkir Lor Kota Salatiga, hal ini terbukti dengan adanya pemanfaatan teknologi baru dan inovasi-inovasi yang terus dilakukan. Proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor juga tidak terlepas dari media massa yang ada. Media massa disini mempunyai peran untuk melakukan kegiatan penyebarluasan informasi atau promosi tentang adanya obyek wisata di Kota Salatiga. Berbagai media massa baik cetak maupun elektronik melakukan perannya dalam proses promosi obyek wisata ini. Peran media massa yang ada di Kota Salatiga seperti web-web pariwisata, web Dinas Pariwisata dan masih banyak lagi digunakan untuk kegiatan promosi dan memperkenalkan obyek wisata yang ada di desa wisata Tingkir Lor Kota Salatiga

Pengelolaan desa wisata tidak terlepas dari adanya proses pengawasan atau *controlling*. Pengawasan dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor menjadi tanggung jawab masyarakat dalam perkembangannya. Perkembangan menjadi desa wisata, Tingkir Lor masih dikatakan sebagai desa wisata yang sedang berkembang masih cukup banyak ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi untuk mencapai derajat desa wisata yang mandiri. Pengawasan yang belum dapat terlaksana oleh pengurus maupun masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan pendapat tidak pada forum resmi yang dilaksanakan oleh pengelola desa wisata. Pengelola mengharapkan masyarakat agar dalam menyampaikan masukan atau gagasan dilakukan pada forum formal yang diselenggarakan oleh pengelola untuk dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan selanjutnya. Pengawasan yang dilakukan masih kurang memadai dikarenakan tidak adanya pengantian pengurus yang telah ditetapkan. Kepengerusan yang ada di Desa Wisata Tingkir Lor dinilai ada beberapa yang perlu dilakukan regenerasi. Pengurus yang bertugas saat ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Salatiga. Kepala desa setempat pun juga kurang inisiatif dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan desa wisata ini. Kelurahan dinilai kurang aktif dalam melaksanakan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor.

Berdasarkan penerapan proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor di Kota Salatiga dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor

2. Pemerintah di Kota Salatiga kurang memperhatikan dan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menunjang bagi proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor seperti sosialisasi dan pelatihan khusus pengelolaan yang baik bagi masyarakat.
3. Belum maksimalnya keterlibatan stakeholders pada proses pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor sehingga proses pengelolaan terlihat berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dibutuhkan integritas dari semua unsur guna menyukseskan proses pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor. Permasalahan yang ada tidaklah dapat selesai jika terdapat unsur yang pasif dalam proses pengelolaan desa wisata Tingkir Lor. Permasalahan yang telah diuraikan menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga?

1.3. Tujuan

1. Untuk menganalisis pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis akan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan pariwisata khususnya pada pengelolaan desa wisata yang didasari oleh partisipasi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang akan diperoleh adalah sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan pengelola Desa Wisata Tingkir Lor dalam melaksanakan pengembangan desa wisata.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Jurnal	Artikel dan Pengarang	Variabel dan Indikator	Tujuan	Temuan
1. <i>Community Involvement And Sustainable Rural Tourism Develompent: Perspective From The Local Communities</i>	<i>European Journal Of Tourism Research</i> Sook Fun Fong And May Chiun Lo	1. Partisipasi masyarakat lokal - Pengambilan keputusan - Berbagi pengetahuan - Pemberdayaan - Pengetahuan masyarakat terhadap pariwisata 2. Pengelolaan desa wisata - Keberlanjutan sosial - Keberlanjutan	Bertujuan untuk mengkaji hubungan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan di Kuching.	Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan, dan pengetahuan tentang pariwisata memang mempengaruhi pada pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

		budaya - Keberlanjutan ekonomi - Keberlanjutan lingkungan		
2. <i>Community-based Tourism Initiative in Rural Malaysia Empowerment</i>	<i>International Review Management and Marketing (IRMM).</i> Kalsom Kayat, Nur Farah Ain Zainuddin.	Pengelolaan - Kapasitas Organisasi - Partisipasi Masyarakat	Menjelaskan kriteria program <i>Homestay</i> Malaysia yang dikatakan berhasil dan untuk memberdayakan masyarakat setempat	Kriteria yang didapatkan dibagi menjadi 2 yakni Kriteria kompetitif (Produk yang unik dan memuaskan, fasilitas dan pelayanan, kemampuan) dan Kriteria Berkelanjutan (Kemampuan mendapatkan keuntungan, Dukungan dan partisipasi Komunitas, Usaha Konservasi)
3. <i>Urban Vs Rural Destinations: Residents' Perceptions Participation And Support For Tourism Development</i>	<i>Science Direct</i> S. Mostofa Rasoolimane sh, Christian M. Ringle, Mastura Jaafar, T. Ramayah	1. Partisipasi masyarakat - Proses pengambilan keputusan - Pendapat atau aspirasi 2. Pengelolaan pariwisata - Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi	Bertujuan untuk menyelidiki dan membandingkan dampak persepsi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dan dukungan dalam pengembangan pariwisata di seluruh warisan dunia perkotaan dan pedesaan	Adanya perbedaan yang signifikan antara dampak persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di daerah perkotaan dan pedesaan.

<p>4. <i>Community Perseption Of Tourism Impacts And Their Participation In Tourism Planning: A Case Study Of Ramsar, Iran</i></p>	<p><i>Science Direct</i> Sajad Alipour Eshliki, And Mahdi Kaboudi</p>	<p>1. Partisipasi masyarakat - Pengambilan keputusan - Pemanfaatan hasil pariwisata</p> <p>2. Pengembangan pariwisata - Perencanaan program - Pelaksanaan - Evaluasi</p>	<p>Bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam program peningkatan kualitas pariwisata.</p>	<p>Menunjukkan bahwa pariwisata mempengaruhi kualitas masyarakat setempat, Juga terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.</p>
<p>5. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali</p>	<p>Kawistara Made Heny Urmila Dewi</p>	<p>1. Pengembangan - Perencanaan - Implementasi - Pengawasan</p> <p>2. Partisipasi - Pengambilan keputusan - Buah pikir atau pendapat</p>	<p>Bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan menentukan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal.</p>	<p>Peran pemerintah terlihat dominan, pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk</p>

				berpartisipasi.
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis <i>Community Based Tourism</i> (CBT) Di Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga	Ejurnal 2 Elina Elfianita	1. Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> - Strategi pengembangan - Upaya pengembangan - Faktor penghambat dan faktor pendukung 	Bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) strategi pengembangan pariwisata berbasis <i>Community Based Tourism</i> (CBT) di Desa wisata Limbasari; (2) usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan kelompok sadar wisata dalam melakukan pengembangan pariwisata berbasis CBT di Desa wisata Limbasari; (3) faktor penghambat dan faktor pendukung dari CBT pada pengembangan wisata di Desa wisata Limbasari.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Strategi pengembangan pariwisata berbasis CBT di Desa Limbasari yaitu dengan promosi, pembangunan fisik, penerapan sapta pesona wisata, penambahan sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan kepariwisataan. (2) Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata adalah dengan menjadikan Desa Limbasari sebagai Desa Wisata Terpadu, memberikan bentuk – bentuk pelatihan untuk masyarakat dan menerapkan sapta pesona wisata di Desa wisata Limbasari. (3) Faktor

				<p>penghambat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari adalah masyarakat, izin dari perhutani serta persaingan obyek dan daya tarik wisata antar wilayah di Limbasari Kabupaten Purbalingga. (4) Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata adalah SDM, alam, sejarah dan budaya, keuangan, kemitraan, sarana dan prasarana serta transportasi.</p>
<p>7. Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif <i>Community Based Tourism</i> (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)</p>	<p>studentjournalub.ac.id</p> <p>Dimas Kurnia Purmada Wilopo</p>	<p>1. Pengembangan desa wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pengorganisasian - Pelaksanaan - Pengawasan 	<p>Bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan, mengetahui penerapan <i>community based tourism</i> dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah.</p>	<p>Penerapan <i>community based tourism</i> dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dapat dilihat melalui beberapa hal seperti memastikan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan pariwisata, pelestarian alam dan budaya dan menjamin adanya</p>

				pemerataan pendapatan masyarakat.
8. Perencanaan Desa Wisata dengan Pendekatan Konsep <i>Community Based Tourism</i> (CBT) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak	Ejurnal 2 Muhammad Syafi'i	a. Pengembangan desa wisata - Perencanaan - Pengorganisasian - Pelaksanaan - Pengawasan	Bertujuan untuk mengetahui peranan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Bedono untuk dikembangkan menjadi desa wisata.	Menunjukkan bahwa Desa Bedono memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata yang didukung komitmen tinggi oleh pemerintah desa untuk membentuk desa wisata, namun kesiapan SDM perlu ditingkatkan dan perlunya dibentuk kelompok sadar wisata.

Sumber: resume dari jurnal yang dibaca

Penelitian terdahulu penting untuk diperhatikan, karena melalui penelitian terdahulu seorang peneliti dapat mempertajam, membandingkan atau bahkan membantah penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu “Analisis Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor” dan berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini :

Pertama, penelitian Sook Fun Fong dan May Chiun Lo dengan judul “*Community Involvement And Sustainable Rural Tourism Development: Perspective From The Local Communitie*”. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji hubungan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Kuching. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan, dan pengetahuan tentang pariwisata memang mempengaruhi pada pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada tahapan proses pengelolaan yang akan diamati.

Kedua, penelitian Kalsom Kayat, Nur Farah Ain Zainuddin dengan judul *“Community Based Tourism Initiative in Rural Malaysia Empowerment”*. Penelitian ini bertujuan untuk kriteria program *Homestay* Malaysia yang dikatakan berhasil dan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kriteria yang didapatkan dibagi menjadi 2 yakni Kriteria kompetitif (Produk yang unik dan memuaskan, fasilitas dan pelayanan, kemampuan) dan Kriteria Berkelanjutan (Kemampuan mendapatkan keuntungan, Dukungan dan partisipasi Komunitas, Usaha Konservasi). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih menekankan pada tahapan pengelolaan dan aktor yang terlibat didalamnya.

Ketiga, penelitian S. Mostofa Rasoolimanesh, Christian M. Ringle, Mastura Jaafar, dan T. Ramayah dengan judul *“Urban Vs Rural Destinations: Residents’ Perceptions Participation And Support For Tourism Development”*. Penelitian ini bertujuan Bertujuan untuk menyelidiki dan membandingkan dampak persepsi masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dan dukungan dalam pengembangan pariwisata di seluruh warisan dunia perkotaan dan pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara dampak

persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mostofa berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada aktor yang terlibat didalamnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada bagaimana partisipasi masyarakat pada setiap tahap pengelolaan pariwisata yang dilakukan dan pada aktor yang terlibat dalam penelitian yang akan dilakukan.

Keempat, penelitian Sajad Alipour Eshliki dan Mahdi Kaboudi dengan judul “*Community Perception Of Tourism Impacts And Their Participation In Tourism Planning: A Case Study Of Ramsar, Iran*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam program peningkatan kualitas pariwisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata mempengaruhi kualitas masyarakat setempat, juga terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pendekatannya dan aktor yang terlibat didalamnya.

Kelima, penelitian Made Heny Urmila Dewi dengan judul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabnan, Bali”. Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman masyarakat lokal atas keberadaan desa wisata, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, dan mengkaji strategi pengelolaan sumber daya pariwisata yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan desa wisata. Berdasarkan penelitaian yang sudah dilakukan menunjukkan beberapa hasil yaitu (1) pemahaman masyarakat mengenai keberadaan desa wisata cukup baik. Akan tetapi masyarakat tidak mampu mempertahankan keberlanjutan ekologi yang ada karena tertekan oleh pemerintah dan investor. (2) Tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dalam proses pengembangan desa wisata. (3) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh tujuh faktor yaitu motivasi, modal, pemahaman, kepemimpinan, komunikasi, sosial budaya, dan manajemen. (4) Proses pengelolaan pariwisata hendaknya berpedoman pada Tri Hita Karana dan dibutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah serta swasta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan yang digunakan dan aktor yang terlibat pada proses pengelolaannya.

Keenam, penelitian Elina Elfianita dengan judul “Pengembangan Pariwisata Berbasis *Community Based Tourism* (CBT) Di Desa Wisata Limbasari Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) strategi pengembangan pariwisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT) di Desa wisata Limbasari; (2) usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan kelompok sadar wisata dalam melakukan pengembangan pariwisata berbasis CBT di Desa wisata Limbasari; (3) faktor penghambat dan faktor pendukung dari CBT pada pengembangan wisata di Desa wisata Limbasari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Strategi pengembangan pariwisata berbasis CBT di Desa Limbasari yaitu dengan promosi,

pembangunan fisik, penerapan sapta pesona wisata, penambahan sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan kepariwisataan. (2) Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata adalah dengan menjadikan Desa Limbasari sebagai Desa Wisata Terpadu, memberikan bentuk-bentuk pelatihan untuk masyarakat dan menerapkan sapta pesona wisata di Desa wisata Limbasari. (3) Faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata di Limbasari adalah masyarakat, izin dari perhutani serta persaingan obyek dan daya tarik wisata antar wilayah di Limbasari Kabupaten Purbalingga. (4) Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata adalah SDM, alam, sejarah dan budaya, keuangan, kemitraan, sarana dan prasarana serta transportasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan.

Ketujuh, penelitian Dimas Kurnia Purmada Wilopo dengan judul “Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif *Community Based Tourism* (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *community based tourism* dalam pengelolaan Desa Wisata Gubugklakah dapat dilihat melalui beberapa hal seperti memastikan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan pariwisata, pelestarian alam dan budaya dan menjamin adanya pemerataan pendapatan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menekankan pada pengelolaan desa wisata dengan menekankan keikutsertaan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan akan digunakan dalam penelitian ini.

Kedelapan, penelitian Muhammad Syafi'i dengan judul "Perencanaan Desa Wisata dengan Pendekatan Konsep *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Bedono memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata yang didukung komitmen tinggi oleh pemerintah desa untuk membentuk desa wisata, namun kesiapan SDM perlu ditingkatkan dan perlunya dibentuk kelompok sadar wisata. Adanya desa wisata dengan keterlibatan masyarakat sebagai pengelola bertujuan menjaga keberlangsungan ekonomi dan kelestarian ekosistem dan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga yaitu pada Kegiatan Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor dengan melihat proses pengelolaan dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pergerakan serta pengawasan.

1.5.2. Administrasi Publik

1.5.2.1. Definisi Administrasi Publik

Menurut John M. Piffner dan Robert V. Presthus dalam Inu Kencana Syafie (2006:23-24): (1) Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. (2) Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama

meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. (3) Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Penjelasan tersebut berbedanya dengan Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro dalam Harbani Pasolong (2013: 8), yang menjelaskan bahwa administrasi publik adalah (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah, (2) meliputi tiga cabang pemerintah eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, (3) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, (5) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa administrasi publik adalah kerjasama pemerintah untuk memberikan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pemerintah meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif merupakan pelaksanaan

kebijakan, legislatif sebagai pembuat kebijakan dan yudikatif sebagai pengawas jalannya kebijakan.

1.5.2.2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Harbani Pasolong (2013: 21) memberikan beberapa penjelasan mengenai ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

Ruang lingkup administrasi publik yang pertama adalah kebijakan publik. William N. Dunn (1994) dalam Harbani Pasolong (2013:39) mengungkapkan kebijakan publik adalah susatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti peratahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Menurut Pasolong dalam bukunya teori administrasi publik (2007: 39) definisi kebijakan publik dapat dikatakan bahwa : 1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, 2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan 3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan sekedar dinyatakan dan kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Ruang lingkup yang kedua adalah birokrasi publik. Weber dalam Harbani Pasolong (2013: 66) menyebutkan definisi dari birokrasi adalah sebagai suatu daftar atau sejumlah daftar ciri-ciri yang sifat pentingnya relative secara hubungannya satu sama lain telah banyak menimbulkan perdebatan. Paling mencolok diantara ciri-ciri ini ialah bidang-bidang kompetensi yang jelas batasnya, pelaksanaan tugas-tugas resmi secara terus menerus. J.B Kristiadi dalam Harbani Pasolong (2013:67) mengatakan bahwa birokrasi adalah merupakan struktur organisasi di sektor pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luas serta memerlukan organisasi besar yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi berbeda. Birokrasi seolah-olah memberi kesan adanya suatu proses yang panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparat pemerintah. Menurut Harbani Pasolong dalam bukunya teori administrasi publik (2013:68) mengungkapkan bahwa definisi birokrasi adalah merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Ruang lingkup ke tiga yaitu manajemen publik. Pada dasarnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman dalam Harbani Pasolong (2013:83), manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM,

keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain. Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua budang administrasi publik yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Ruang lingkup yang keempat yaitu kepemimpinan. James A.F Stoner dalam Harbani Pasolong (2013:110-111), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas berkaitan dengan pekerjaan dengan anggota kelompok.

Ruang lingkup yang kelima yaitu pelayanan publik. Menurut Sinambela dalam Harbani Pasolong (2013: 128) pelayanan publik merupakan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Ruang lingkup yang keenam yaitu administrasi kepegawaian Negara. Nicholas Henry dalam Harbani Pasolong (2013:151) mengatakan bahwa administrasi kepegawaian Negara adalah pengurusan, pengaturan, dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah.

Ruang lingkup yang ketujuh adalah kinerja. Murphy dan Cleveland dalam Harbani Pasolong (2013: 175), mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Widodo dalam Harbani Pasolong (2013: 175), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Ruang lingkup administrasi publik yang ke delapan yaitu, etika administrasi publik. Menurut Magnis Suseno dalam Harbani Pasolong (2013: 191), etika adalah ilmu dan bukan sebuah jajaran, yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup dalam moralitas. Etika administrasi publik yang dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam menjalankan tugas manifestasi.

1.5.2.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam Inu Kencana Syafie (2006:27) memilah-milah bahwa ada 5 (lima) kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu sebagai berikut:

a. Paradigma 1 Dikotomi Politik dan Administrasi (1900)

Tokoh-tokohnya yaitu Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tulisannya "*Politics and Administration*" mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya kepada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan legislatif dalam melakukan tujuan dan perumusan kebijakan dibantu oleh badan yudikatif. Implementasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Paradigma ini hanya ditekankan *locus* nya saja yaitu "*government bureaucracy*", sedangkan *focus* nya kurang dibahas dengan jelas. Pengertian administrasi dalam paradigma ini kurang dipaparkan secara jelas.

b. Paradigma 2 Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Willoughby, Gullick & Urwick yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor yang menerapkan prinsip-prinsip administrasi sebagai *focus* administrasi publik yang dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) dan lebih menekankan *focus* daripada *locus*nya.

c. Paradigma 3 Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein-Marx (editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946) mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistennya prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Administrasi negara

bukan *value free* (dapat berlaku dimana saja) tetapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Disini terjadi pertentangan mengenai *value free administration* dengan anggapan *value-laden politics* di lain pihak. Dalam praktek ternyata anggapan kedua yang berlaku, karena itu John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya, muncul paradigma baru ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Akan tetapi, mereka yang memberi kritik tersebut hanya membesar-besarkan kritik dan tidak memberikan solusi tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

d. Paradigma 4 Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset, operasi dan sebagainya merupakan fokus dari paradigma ini. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya di dunia bisnis, tetapi juga di dunia administrasi publik, sehingga lokus tidak jelas.

e. Paradigma 5 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokus dari paradigma kelima ini adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

Paradigma menurut Henry tersebut, masih ada pergeseran paradigma dalam administrasi publik Islamy dalam Suwitri (2008:16) adapun pergeseran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Paradigma 6 : *Reinventing Government*

Pemerintah bergaya “wirausaha” menjadi cara yang efisien dan efektif untuk menghindari bangkrutnya suatu birokrasi. Pada paradigma ini Administrasi Negara dipaksa untuk melakukan reformasi, sehingga istilah reformasi administrasi, reformasi dan revitalisasi birokrasi serta reorganisasi mengemana dimana-mana (Caiden, 1982). Paradigma ini bersifat normatif, merubah cara berfikir tentang peranan administrator publik. Pemerintah (birokrat) tidak lagi dilayani melainkan melayani publik. Pelayanan publik mengedepankan di paradigma ini. Paradigma *Reinventing Government* ini juga dikenal dengan nama *New Public Management* (NPM). NPM membagi kosentrasi Ilmu Administrasi Negara menjadi Ilmu Kebijakan Publik dan Manajemen Publik.

b. Paradigma 7 : *Good Governance*

Wirausaha birokrasi (*New Public Management*) harus dijalankan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik. *New Public Management* berjalan seiring dengan *New Public Service*. Kata Pemerintah (*Government*) berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti “mengarahkan”. Tugas pemerintah adalah

mengarahkan bukan mengayuh perahu. Tugas stakeholders adalah mengayuh perahu dengan pengarahannya dari pemerintah (NPM). Stakeholders akan membantu pemerintah dalam tugas melayani sehingga tercapai NPS. Pemerintah akan berjalan dengan baik apabila diikuti pemerintahan yang baik (*good governance*). Denhardt, Denhardt (2003) menyatakan pencapaian *good governance* dalam *government* merupakan era *New Public Service* (NPS).

1.5.3. Manajemen Publik

1.5.3.1. Definisi Manajemen

Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain (*getting things done through the effort of other people*). (Umam, 2012: 13)

Menurut G.R.Terry dalam Umam (2013:15) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Luther Gullick dalam Tani Handoko (2012:11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan serta membuat sistem kerjasama yang bermanfaat untuk manusia. Keseluruhan sumber daya yang ada di organisasi membutuhkan adanya

proses pengaturan atau manajemen. Adanya manajemen, pemanfaatan sumber daya seperti manusia dan mesin dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

1.5.3.2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Suatu manajemen mempergunakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sekelompok manusia dengan metode ilmiah serta dibantu sumber tertentu. Fungsi-fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh pimpinan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Para ahli manajemen juga tidak ada satu kesatuan pendapat mengenai jenis-jenis fungsi manajemen. Perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3

Fungsi-Fungsi Manajemen menurut Beberapa Ahli

Nama Ahli	Fungsi-Fungsi Manajemen
George R.Terry	<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>
Henry Fayol	<i>Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling</i>
Harold Koontz & Cyril O'donnel	<i>Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling</i>
Luther Gullick	<i>Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting</i>
Ernest Dale	<i>Planning, Organizing, Staffing, Directing, Innovating, Representating, Controlling</i>
The Liang Gie	<i>Planning, Dicision Making, Directing, Coordinating, Controlling, Improving</i>
Prajudi Atmosudirdjo	<i>Planning, Organizing, Directing/Actuating, Controlling</i>
Siagian	<i>Planning, Organizing, Motivating, Controlling</i>
Winardi	<i>Planning, Organizing, Coordinating, Actuating, Leading, Communication, Controlling</i>
Jhon R.Beisline	<i>Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling</i>
William H.Newman	<i>Planning, Organizing, Assembling Resourcess, Directing,Controlling</i>

Sumber: Malayu S.P. Hasibuan,2006; Anton Athoillah, 2010; Dyah Hariani, 2013; Khaerul Umam, 2013; Manullang, 2015.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi manajemen yang berbeda dari masing-masing ahli. Penelitian ini peneliti menggunakan teori fungsi manajemen menurut George R.Terry dalam Umam (2013:15) yaitu *planning, organizing, actuating*, dan *controlling*. Teori tersebut selanjutnya akan digunakan peneliti untuk menjadi dasar dalam melakukan penelitian.

1. Perencanaa (*Planning*)

Perencanaan merupakan bagian terpenting dari sebuah kesuksesan, karena perencanaan adalah langkah pertama sebelum manajer melakukan perorganisasian, pengarahan dan evaluasi. Seorang manajer harus membuat rencana yang menggariskan tujuan dan sasaran, arah kepada organisasi, menentukan apa yang akan dilakukan dan kapan dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan siapa yang mengerjakannya dan ini menandakan bahwa perencanaan menduduki posisi strategis (Subekti Ridhotullah dan Moh. Jauhar, 2015: 126).

Menurut Certo dalam Zakiyudin (2013: 19), perencanaan merupakan proses penentu bagaimana sistem manajemen (organisasi) akan mencapai atau merealisasikan tujuannya. Istilah lain yang lebih formal, perencanaan diartikan sebagai pengembangan program aksi (tindakan) sistematis yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang disepakati melalui proses analisis, evaluasi dan pemilihan diantara peluang-peluang yang diramalkan akan muncul.

George. R. Terry (Hasibuan, 2006: 92) mendefinisikan perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperkukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Para manajer pertama-tama harus memutuskan apa yang ingin dikerjakan, harus menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk organisasi, serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Peramalan sejauhmana kemungkinan tersebut dapat dicapai,

baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan politik tempat organisasinya beroperasi, serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut.

Menurut Hasibuan (2006:95), terdapat beberapa jenis rencana sebagai berikut:

a. Tujuan (*objective*)

Tujuan disebut suatu jenis rencana karena akan dicapai dimasa depan. Menurut Wilson tujuan adalah pusat perhatian (*area of concern*), sampai sejauh mana bidang-bidang atau pusat perhatian itu dapat direalisasikan pada waktu tertentu, ditentukan oleh perkiraan kemampuan yang dimiliki dan hasil yang hendak dicapai. Tujuan yang diinginkan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dan ditafsirkan oleh orang lain.

b. Kebijakan (*policy*)

Kebijakan adalah suatu jenis rencana yang memberikan bimbingan berpikir dan arah dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini makan rencana akan semakin baik dan menjuruskan daya pikir dari pengambilan keputusan kearah tujuan yang diinginkan. Menurut G.R. Terry kebijakan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arahan yang akan dilakukan.

c. Prosedur

Prosedur juga merupakan suatu jenis rencana, karena prosedur menunjukkan pemilihan cara bertindak dan berhubungan dengan aktivitas-aktivitas masa depan. Prosedur memberikan detail-detail tindakan, sehingga suatu aktivitas

tertentu harus dilaksanakan. Menurut G.R. Terry prosedur adalah serangkaian tugas yang mewujudkan urutan waktu dan rangkaian itu harus dilaksanakan.

d. *Rule*

Rule adalah suatu rencana tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati. *Rule* dimaksudkan untuk memberikan bimbingan agar setiap tindakan menyimpang dari peraturan.

e. Program

Program merupakan suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret. Rencana akan konkret, karena dalam program sudah tercantum baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggarannya. Program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang masing-masing.

f. *Budget*

Budget atau anggaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan pada setiap bidang. Anggaran hendaknya tercantum besarnya biaya dan hasil yang akan diperoleh.

g. Metode

Metode merupakan hal yang fundamental bagi setiap tindakan dan berhubungan dengan prosedur. Menurut G.R. Terry suatu metode dapat didefinisikan sebagai hasil penentuan cara pelaksanaan suatu tugas dengan

pertimbangan yang memadai menyangkut tujuan, fasilitas-fasilitas yang disediakan dan jumlah penggunaan waktu, uang dan usaha.

h. Strategi

Strategi juga termasuk jenis rencana, karena akan menentukan tindakan-tindakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan proses bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan sasaran secara sistematis yang digunakan untuk menghasilkan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi perorganisasian (*organizing* = pembagian kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian harus direncanakan. *Organizing* berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap keseluruhan.

Louis A. Allen dalam R. Supomo (2018:43) mendefinisikan pengorganisasian sebagai proses pentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Menurut George R. Terry dalam Hasibuan (2006: 119) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif

antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Menurut T. Hani Handoko (2011: 167) berpendapat bahwa pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melengkapinya. Terdapat dua aspek utama dalam proses penyusunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan yang sejenis dan berhubungan dapat dikerjakan bersama. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Istilah pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertian, istilah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya seperti keuangan, fisik, bahan baku dan tenaga kerja.
- b. Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatan, dimana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.
- c. Hubungan-hubungan antar fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dan para karyawan.

- d. Cara bagaimana para namanjer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mengelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut.

Kegiatan-kegiatan dalam fungsi pengorganisasian menurut Subekti Ridhotullah (2015:125) yaitu:

- a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang digunakan
- b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
- c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya
- d. Kegiatan penempatan sumber daya pada potensi yang paling tepat

Menurut Silalahi dalam Hasibuan (2006: 33) untuk menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien, maka setiap pengorganisasian melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembagian kerja

Pembagian kerja merupakan kegiatan mengurai pekerjaan dalam satuan-satuan tugas yang terspesialisasi sehingga tiap orang anggota organisasi mengerjakan dan tanggung jawab melaksanakan seperangkat tugas yang terbatas bukan keseluruhan tugas. Seluruh tugas unit dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berurutan atau tugas-tugas dibagi-

bagi dan dikhususkan diantara orang-orang dalam unit itu disebut *division of labor* (Amirullah, 2004: 169). Hakikat spesialisasi kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda.

b. Pengelompokan kerja

Departementalisasi merupakan suatu metode untuk membagi dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit-unit organisasi yang terpisah dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. pengertian lain departementalisasi adalah menggabungkan kembali dan mengelompokkan menjadi satu pekerjaan individual (Amirullah, 2004:170). Departementalisasi memberikan batasan kekuasaan dan tanggung jawab pada setiap departemen yang akan dibentuk sehingga memudahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan pembagian kerja yang ditetapkan. Keuntungan lainnya adalah adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi. Karena setiap fungsi dan pembagian kerja yang dilakukan telah diberikan fungsi dan ruang lingkup pekerjaan yang jelas

c. Distribusi wewenang

Otoritas atau wewenang adalah kekuasaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Hani Handoko dalam Amirullah (2004:190) memberikan pengertian wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.

Wewenang biasanya di distribusikan atau diberikan oleh seseorang pemimpin kepada bawahannya untuk mengatur pekerjaan yang dilakukan.

d. Koordinasi

Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A dalam Handoko (2006:183) mendefinisikan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga dapat saling mengisi dan saling membuat dan saling melengkapi.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengorganisasian merupakan proses penetapan sumber daya kedalam tugas-tugas melalui pengelompokkan dan pembagian pekerjaan, menetapkan dan melimpahkan wewenang, agar saling berkerjasama dan rencana yang dibuat dapat terintegritas dengan baik guna mencapai tujuan.

3. Pengarahan/Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut Hasibuan (2006: 183) fungsi pengarahan (*directing = actuating = leading = penggerakan = pengarahan*) merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada.

Kootz dan O'Donnel dalam Hasibuan (2006:183) mengungkapkan bahwa pengarahan merupakan hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan yang nyata,

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006:183), pengarahan merupakan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama secara ikhlas serta

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengann perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Menurut Silalahi (2011:270) suatu kegiatan pengarahan memiliki proses sebagai berikut :

a. Komunikasi

Menurut Gatewood dan Taylor dalam Amirullah (2004:282), mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses memindahkan informasi dan pengertian (maksud) dari satu orang kepada orang lain informasi dan pengertian dapat dipindahkan dalam berbagai macam bentuk seperti lisan atau tulisan, dan metode-metode yang digunakan untuk memindahkan informasi dan pengertian dapat berupa memo, telepon atau laporan. Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam manajemen, karena proses manajemen terlaksana jika komunikasi dilakukan. Komunikasi ialah pertukaran (penyampaian dan penerimaan) informasi antara pengirim dan penerima sehingga ada saling pengertian karena memiliki makna yang sama tentang pesan yang dikirim dan diterima.

b. Kepemimpinan

Berdasarkan prespektif manajemen, kepemimpinan adalah hubungan pengaruh antara manjer dan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Menurut Terry dan Frankin dalam Amirullah (2004:245) kepemimpinan merupakan sebagai hubungan dimana seseorang pemimpin mempengaruhi orang lain untuk mau bekerjasama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan. Peran pemimpin

juga diperlukan untuk mengupayakan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, sehingga peran pemimpin disini sangat penting untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan.

c. Motivasi

Menurut Sukanto dan Handoko dalam Amirullah (2004:218) motivasi merupakan sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi berarti hal atau suatu keadaan yang menimbulkan dorongan.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa pengarahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, memgerakkan, mengatur segala kegiatan melalui komunikasi serta memberikan motivasi kepada semua anggota yang telah diberikan tugas agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006: 242) pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sondang Siagian dalam Syafei (2010:82) mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Harold Koontz dalam Hasibuan (2006: 242) menyatakan, pengendalian merupakan pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*Controlling*) atau pengendalian. Manajer menentukan sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan dan sampai sejauhmana sudah dikerjakan. Manajer harus tahu apa apa yang telah terjadi agar dapat melangkah lebih lanjut, ataukah perlu di adakan perbaikan/ perubahan didalam organisasi, apabila terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan. Adapun fungsi pengawasan meliputi :

- a. Persiapan Standar.
- b. Monitoring untuk mengetahui kerja sesungguhnya.
- c. Pengecekan untuk mengetahui hasil kerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar.
- d. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan.

Berdasarkan pemaparan para ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen berhubungan dengan usaha manusia untuk mencapai suatu tujuan dengan membuat sebuah sistem manajemen yang berfungsi sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh organisasi.

1.5.3.3. Definisi Manajemen Publik

Menurut George Terry (1964) dalam bukunya yang berjudul "*Principle of Management*". "*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated jective by the use of human being and other resources*". Maknanya, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Harbani Pasolong (2013:83), manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain.

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) manajemen publik merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan dari fungsi manajemen seperti *planning, organizing, actuating dan controlling* satu sisi, dengan sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Berdasarkan pendapat Overman tersebut, kemudian OTT, Hyde dan Shafritz mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Kebijakan publik dapat diibaratkan sebagai sistem otak dan syaraf, sedangkan manajemen publik digambarkan sebagai sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Maka, manajemen publik merupakan proses dalam menggerakkan sumberdaya manusia

dan non sumberdaya manusia sesuai perintah kebijakan publik. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik saling berkaitan satu sama lainnya.

1.5.4. Pariwisata

1.5.4.1. Definisi Pariwisata

Menurut Deddy Prasetya Maha Rani dalam Gamal Suwanto SH (2014: 12) Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, politik, sosial, budaya. Melihat pariwisata sebagai suatu sistem berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa di lepaskan dari subsistem yang lain seperti politik, ekonomi, budaya dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, dimana perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya sampai akhirnya kembali ditemukan kesesuaian yang baru.

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks dan bersifat multisektoral. Pandangan demikian itu menimbulkan berbagai persepsi dan pemahaman terhadap pariwisata, baik sebagai sebuah konsep, sebagai industry, sebagai aktivitas, maupun sebagai system.

Dengan pemahaman demikian, pariwisata dapat disoroti dari berbagai sudut pandang. Kompleksitas pariwisata yang dimaksud antara lain: pariwisata sebagai pengalaman manusia, pariwisata sebagai perilaku sosial, pariwisata sebagai fenomena geografis, pariwisata sebagai suatu sumberdaya, pariwisata sebagai bisnis dan pariwisata sebagai industri.

Proses pariwisata memerlukan banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem pariwisata. Aktor tersebut berada pada berbagai sektor dalam pariwisata. Secara umum pariwisata di kelompokkan dalam tiga pilar utama yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Masyarakat yaitu masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan, intelektual, LSM, dan media massa. Kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha sedangkan kelompok pemerintah adalah berbagai wilayah administrasi dari Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna apabila komponen-komponen tersebut menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya, seperti kewajiban pemerintah adalah bersama-sama merencanakan, membangun, mengorganisasikan, memelihara dan menjalankan pengawasan dengan pemerintah daerah dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 7, pembangunan kepariwisataan terdapat 4 poin yang meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata.

1. Industri pariwisata

Industri pariwisata merupakan beberapa usaha pariwisata yang saling terikat dalam upaya menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Terdapat elemen dalam industri pariwisata yaitu :

- a. Sumberdaya Pariwisata
 1. Sumberdaya alam
 2. Sumberdaya Manusia
 3. Sumberdaya ciptaan manusia
- b. Fasilitas Hiburan dan Olahraga
 1. Fasilitas rekreasi dan kebudayaan
 2. Fasilitas olahraga
- c. Prasarana umum dan Pariwisata
 1. Alat komunikasi dan perjalanan
 2. Instalasi sosial
 3. Instalasi dasar
- d. Pelayanan Penerimaan Pariwisata
 1. Agen dan biro perjalanan
 2. Kantor promosi dan kontor perwakilan
 3. Pelayanan informasi pengunjung
 4. Penyewaan kendaraan
 5. Pramuwisata dan petugas interpretasi
- e. Fasilitas Penerimaan
 1. Hotel, wisma tamu, desa dan kota

2. Tempat pemukiman lainnya
3. Pemukiman untuk kebutuhan perorangan
4. Instalasi untuk pelayanan makan dan minum

2. Destinasi pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan, Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

3. Pemasaran

Pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

4. Kelembagaan kepariwisataan

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata

mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Menurut Nyoman S. Pendit (2002: 37), pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wisata Budaya

Jenis wisata perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan–kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan–kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan. Wisata budaya yang ada di Salatiga antara lain adalah Suran Ki Hajar Sampurno yang dilaksanakan setiap satu (1) suro, saparan, tirakatan setiap hari jadi tanggal 23 Juli, kirab budaya hari jadi setiap 24 Juli.

2. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih–lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat–lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan didaerah–daerah atau negara–negara maritime. Salatiga tidak mempunyai tempat atau destinasi wisata maritim.

3. Wisata Industri

Jenis wisata ini banyak dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian atau bahkan membeli produk hasil industri yang ada. Destinasi wisata industri di Salatiga merupakan Desa Wisata Tingkir Lor.

4. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi)

Jenis wisata ini banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dengan kegemaran memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang beraneka warna yang memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat. Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang dan marga satwa yang langka serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain. Salatiga tidak memiliki wisata cagar alam.

5. Wisata Pertanian (Agrowisata)

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan

berbagai jenis sayur–mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi. Salatiga mempunyai Agrowisata Salib Putih yang menyediakan fasilitas bumi perkemahan, area *outbond*, penginapan serta taman.

6. Wisata Buru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri–negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Salatiga sendiri tidak mempunyai tempat wisata untuk berburu.

7. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat–tempat suci, ke makam–makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata ziarah di Salatiga yaitu di Makam Kyai Abdul Wahid pada setiap Bulan Sya’ban bertepatan dengan rangkaian kegiatan nyadran, masyarakat melaksanakan Haul atau Tahlilan bersama di kompleks makam Kyai Abdul Wahid yang dihadiri oleh masyarakat Salatiga dan sekitarnya, terutama Jema’ah NU.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa jenis wisata yang ada di Desa Wisata Tingkir Lor tergolong jenis wisata industri atau biasa disebut wisata belanja karena selain menyuguhkan keindahan alamnya Desa Wisata Tingkir Lor

juga memiliki hasil industri yang bermacam mulai dari pakaian serta makanan. Jadi, potensi wisata tersebut penting untuk dikembangkan dalam pemanfaatan oleh masyarakat desa itu sendiri.

1.5.4.2. Definisi Desa Wisata

Nurhayati dalam Made Antara (2015:13) desa wisata adalah suatu bentuk integritas antar atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa suatu desa yang memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi dan penginapan. Ciri dan daya tarik utama dari sebuah desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

Menurut Inskeep dalam Argyo Demartoto (2009:124) mendefinisikan desa wisata sebagai *“where small group of tourist stay in or near traditional, often remote village and learn about village life and the local enviroment”*, maksudnya bahwa suatu bentuk pariwisata dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di desa tradisional, sering di desa-desa terpencil dan mempelajari tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat. Berdasarkan pengertian ini Inskeep lebih melihat pariwisata pedesaan sebagai wisata datang dan mempelajari kehidupan masyarakat yang dikunjunginya bahkan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan penduduk.

1.5.4.3. Faktor Penentu Pengelolaan Pariwisata

Menurut Nyoman S. Pendit (2016:30) mengemukakan tentang persyaratan menjadi faktor penentu pengelolaan obyek pariwisata yaitu:

a. Faktor masyarakat

Masyarakat lokal adalah pihak yang paling akan menerima dampak dari kegiatan wisata yang dikembangkan di daerahnya. Oleh karena itu aspirasi masyarakat sangatlah penting dan komponen permintaan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan wisata. Aspirasi masyarakat khususnya masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menimbulkan hubungan saling menguntungkan antara pengelola pariwisata dengan masyarakat sehingga menjadi sebuah multiplier efek yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

b. Faktor alam

Potensi alam yang menjadi faktor dalam keputusan pengembangan daerah tujuan wisata yaitu :

1. Keindahan alam; antara lain topografi umum seperti flora dan fauna di sekitar danau, sungai, pantai, laut, pulau, mata air panas, sumber mineral, teluk, goa, air terjun, cagar alam, hutan dan sebagainya.
2. Iklim; antara lain sinar matahari, suhu udara, cuaca, angin, hujan, panas, kelembapan dan sebagainya.

c. Faktor Sejarah

Sejarah merupakan sebuah peninggalan pada suatu daerah atau wilayah yang menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat dikembangkan seperti bangunan bekas istana, tempat ibadah, kota tua, bangunan purbakala, legenda dan lain sebagainya.

d. Faktor Keuangan

Keuangan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengembangan pariwisata biaya sangatlah dibutuhkan, dalam pengembangannya tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata ini. Investor/swasta merupakan salah satu pihak yang dapat diandalkan dalam pengembangan pariwisata.

e. Faktor SDM

Ketersediaan sumber daya yang terdidik dan terlatih sangat mempengaruhi dalam pengembangan dan perencanaan pariwisata. Kebutuhan pasar akan sumber daya manusia yang terdidik, terlatih dan berkompeten dalam bidang pariwisata sangat dibutuhkan.

1.5.5. Partisipasi Masyarakat

1.5.5.1. Konsep Partisipasi Masyarakat

Sumaryadi (2013:46) menyatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan memberikan masukan berupa pikiran tenaga, aktu keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat lokal memungkinkan masyarakat mengetahui segala aspek dalam rangka mewujudkan kesuksesan pengembangan

daerah mereka yang pada akhirnya menimbulkan penghargaan yang tinggi dari masyarakat lokal atas hasil yang mereka capai.

Berhasilnya suatu program memang kembali lagi kepada seberapa besar partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut. Walaupun aparat desa sudah bekerja keras. Partisipasi mendukung masyarakat untuk memulai sadar “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah. (Nasdian, 2014: 91). Pasalnya, bila dilihat dari sumber pemicunya, partisipasi yang ideal adalah yang didorong oleh kesadaran dan determinasi masyarakat sendiri, bukan partisipasi yang digerakkan ataupun dipaksakan oleh pihak lain. (Soetomo, 2009: 295).

Laksana (2013:61) menyebutkan bahwa secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam proses pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang, kelompok maupun masyarakat dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek atau program pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan dimaknai sebagai perwujudan dari kesadaran dan kepedulian juga tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang memiliki tujuan memperbaiki hidup mereka, sehingga dalam konteks ini masyarakat diharapkan mulai sadar bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Mardikanto dkk (2013:82) menyatakan bahwa dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat perwujudan dari kesadaran dan kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga memuat keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam suatu program dilingkungannya mulai dari proses pembuatan keputusan, perencanaan, pelaksanaan program, mengevaluasi program, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil dari program tersebut, dengan cara memberikan masukan atau sumbangan berupa pikiran, tenaga, waktu keahlian, modal atau materi, sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan program tersebut.

1.5.5.2. Unsur Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet dalam A Ainur (2016: 10) ada 3 unsur pokok partisipasi masyarakat yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan untuk masyarakat, hal ini dapat dilihat dari poin – poin berikut:
 - a. Kemauan politik penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan

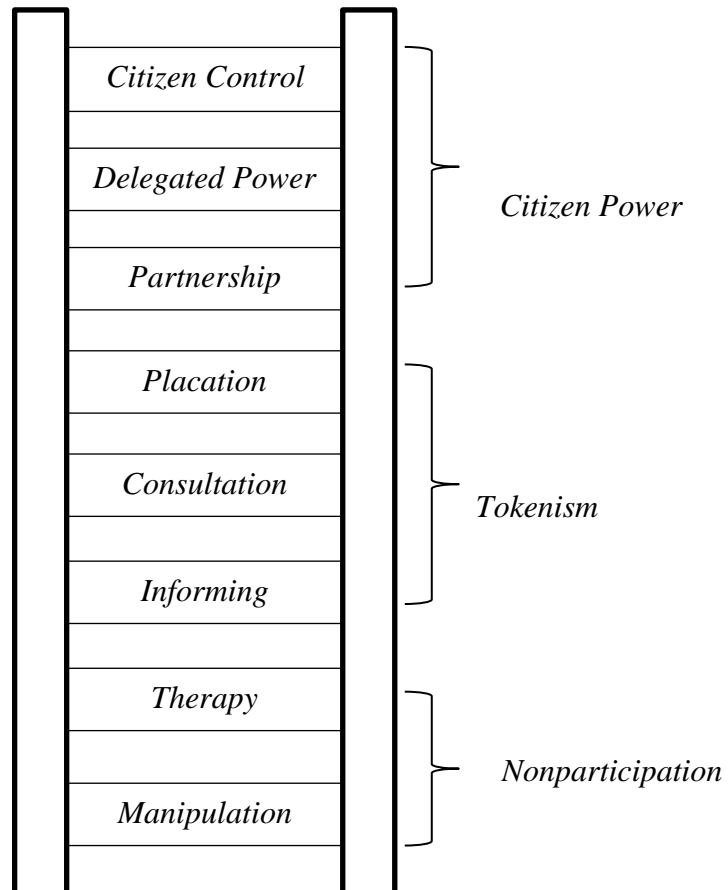
- b. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
 - c. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya
 - d. Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat termasuk peralatan
 - e. Kesempatan untuk berorganisasi termasuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan
 - f. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini:
- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan
 - b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya
 - c. Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri
 - d. Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan
 - e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya memperbaiki mutu hidup
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, kemampuan yang dimaksud adalah:

- a. Kemampuan menemukan dan memahami kesempatan atau pengetahuan terkait peluang untuk memperbaiki mutu hidupnya
- b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
- c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan lain yang tersedia dengan optimal.

1.5.5.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Sherry R Arnstein dalam Ainur Rohman (2009: 47) membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan, diantaranya adalah kontrol warga negara (*citizen control*): pada tataran ini publik berwenang memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Setelah itu delegasi kewenangan (*delegete power*): kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan kemitraan (*partnership*): ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untk merencanakan dan mengambil keputusan bersama. Secara lebih lengkap tingkat partisipasi yang diajukan Arnstein (Ainur Rohman, 2009: 47) dalam tulisannya A Ladder of Citizen Participation sebagai beriku:

Gambar 1.1
Tingkat Partisipasi Masyarakat



Sumber: Arnstein dalam Ainur Rohman (2009: 47)

Tangga terbawah ada dua tingkatan yang digolongkan bukan sebagai partisipasi atau merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non participation*), meliputi: (1) manipulasi (*manipulation*) dan (2) terapi (*therapy*). Kemudian diikuti dengan tangga (3) menginformasikan (*informing*), (4) konsultasi (*consultation*), dan (5) penentraman (*placation*), dimana ketiga tangga itu digambarkan sebagai tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan

kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah (6) kemitraan (*partnership*), (7) pendelegasian wewenang / kekuasaan (*delegated power*), dan (8) pengendalian masyarakat (*citizen control*). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan partisipasi yaitu sebagai berikut:

a. Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau "menyembuhkan" partisipan (masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tapi hadir dalam forum).

b. Terapi (*Therapy*)

Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan "penyakit" masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antar ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

c. Informasi (*information*)

Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada

masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feed back*).

d. Konsultasi (*Consultation*)

Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjangkaran aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

e. Penentruman (*Placation*)

Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.

f. Kemitraan (*Partnership*)

Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasiai dan melakukan kesepakatan.

g. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

h. Pengendalian Warga (*Citizen Control*)

Tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

Berdasarkan tingkat-tingkat partisipasi yang telah dijabarkan dapat memberikan gambaran tentang partisipasi yang telah dilakukan masyarakat dalam proses pengembangan. Gambaran tersebut mengenai tentang kekuasaan yang terdapat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengembangan berada di tangan masyarakat atau di tangan pemerintah. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan harus disediakan arena partisipasi yang berpaham demokrasi agar aspirasi masyarakat dapat ditampung sehingga distribusi kekuasaan bisa terdistribusi secara merata dengan demikian kekuasaan tidak hanya pada pemerintah saja.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Pengelolaan Pariwisata merupakan suatu proses kegiatan pengelolaan kepariwisataan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah serta swasta yang dimulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Proses Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses dalam menyiapkan keputusan mengenai Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga termasuk di dalamnya apa yang akan dikerjakan sekarang dan apa yang akan dikerjakan di masa depan. Perencanaan yang matang sangat menentukan keberhasilan dari Proses Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Proses perencanaan yang dilakukan mencakup:

- a. Penetapan tujuan dilakukannya pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga
- b. Penetapan anggaran yang digunakan dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga
- c. Pembuatan skala prioritas pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan sebuah kegiatan untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di lakukan dalam Proses Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Aktor yang berperan dalam proses pengorganisasian Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga. Proses pengorganisasian meliputi:

- a. Pembagian dan pengelompokan pekerjaan dalam pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor

- b. Pendistribusian wewenang yang jelas dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor
- c. Menentukan bentuk koordinasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor

3. Pengarahan/Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan ketika pelaksanaan proses Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Pelaksanaan dilihat melalui bagaimanapun baiknya suatu proses pengelolaan pariwisata apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan proses pengelolaan semakin didekatkan pada tujuan yang diinginkan. Tahap pelaksanaan ini diperlukan kordinasi dan keterpaduan antar sektor dan stakeholder sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Aktor yang berperan dalam proses pelaksanaan dari Proses Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga adalah masyarakat, bisnis dan pemerintah. Proses pengarahan/pelaksanaan meliputi:

- a. Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor
- b. Melakukan pengembangan potensi yang dimiliki Desa Wisata Tingkir Lor
- c. Melakukan pengupayaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolan Desa Wisata Tingkir

4. Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan Proses Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata

Tingkir Lor Kota Salatiga. Pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat seperti dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Aktor yang berperan dalam proses pengawasan dari Pengelolaan Pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga yaitu masyarakat itu sendiri dan pemerintah Desa Tingkir Lor maupun Dinas Pariwisata Kota Salatiga. Proses pengawasan meliputi:

- a. Menentukan standar pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor
- b. Mengidentifikasi hambatan dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor
- c. Menentukan upaya mengatasi hambatan dalam kegiatan pengelolaan Desa Tingkir Lor

Faktor penentu dalam proses pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tingkir Lor sebagai berikut :

- a. Faktor masyarakat
- b. Faktor alam
- c. Faktor sejarah
- d. Faktor keuangan
- e. Faktor SDM

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofi dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai

rancangan penelitian (*research design*) tertentu. rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi dari apa data dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah. Tujuan rancangan penelitian ini adalah melihat penggunaan metode penelitian yang tepat, dirancang kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang diteliti terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti.

1.7.1. Desain Penelitian

Menurut Newman & Benz dalam Creswell (2013: 3) ada tiga jenis penelitian yaitu: penelitian kualitatif, kuantitatif dan metode campuran. Hakikatnya, tiga pendekatan ini tidak lah terpisah satu sama lain seperti ketika pertama kali muncul. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif seharusnya tidak dipandang sebagai antitesis atau dikotomi yang saling bertentangan; keduanya hanya merepresentasikan hasil akhir yang berbeda, namun dalam satu *continuum*. Suatu penelitian hanya akan lebih kualitatif ketimbang kuantitatif, atau sebaliknya. Penelitian metode campuran berada ditengah *continuum* tersebut karena penelitian ini melibatkan unsur-unsur dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2013: 4). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini nantinya akan mendiskripsikan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan yang muncul dalam proses pengelolaan di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs Penelitian merupakan locus atau tempat pelaksanaan penelitian (setting tempat). Pada penelitian ini, lokus yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Wisata Tingkir Lor, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.

1.7.3. Subjek Penelitian

Penelitian ini membutuhkan informasi dari beberapa pihak, yakni dari pihak stakeholders terkait, swasta dan masyarakat yang akan diwakili oleh :

- a. Dinas Pariwisata Kota Salatiga
- b. Kepala Kelurahan Tingkir Lor
- c. Pengelola Desa Wisata Tingkir Lor
- d. Masyarakat setempat

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi partisipatoris. Bentuk lain dapat berupa gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan dalam jenis data, berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan dokumen, foto, dan statistic dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian, ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan daftar Pertanyaan yang diajukan kepada informan mengenai proses pengelolaan di Desa Wisata Tingkir Lor.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber dari data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, berasal dari tinjauan pustaka, data statistik, dan sumber data dari Kepala Desa, dan Dinas Terkait serta masyarakat.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Kelengkapan informasi didapatkan yang sesuai dengan fokus penelitian maka dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait objek yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik observasi untuk memudahkan peneliti mendapatkan data di lapangan, observasi yang digunakan merupakan observasi.
2. Teknik wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau secara tidak langsung (sistem responden) (Muhidin, 2011). Penelitian ini

menggunakan sistem wawancara secara langsung kepada *stakeholder* terkait, serta masyarakat setempat desa wisata Tingkir Lor Kota Salatiga yang dilengkapi dengan alat bantu *voice recorder*, buku catatan dan kamera.

3. Teknik Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder dan penelitian kepustakaan terkait proses pengelolaan di Desa Wisata Tingkir Lor.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan suatu usaha yang dijalankan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah, mengelola, mensitesikan, mencari dan menemukan pola terkait hal-hal penting yang dipelajari.

1. Pengumpulan Data, merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai hasil pengambilan data.
2. Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum hal-hal penting untuk kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini digunakan karena didalam penelitian data yang diperoleh akan sangat banyak
3. Uji keabsahan, Uji keabsahan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data. Pengujian data menggunakan teknik triangulasi.

4. Penyajian data, yaitu data yang direduksi disajikan kedalam uraian singkat, grafik, tabel, diagram dan sebagainya, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami permasalahan dan langkah didalam menyelesaikannya.
5. Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan bersifat sementara karena sewaktu-waktu didalam penelitian dapat menemukan bukti yang lebih.

1.7.8. Kualitas Data

Menurut Sugiyono 2008:273, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu,

1. Triangulasi sumber, Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik, Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan

dengan wawancara ,observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas data dengan menganalisa sumber, dimana peneliti tidak hanya mencari sumber informasi melalui wawancara satu informan saja, namun dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang berbeda, yang kemudian dipastikan kebenarannya dengan analisis data hasil wawancara sesuai dengan proses lapangan melalui observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan.

Tabel 1.4

Bagan Alur Penelitian

